

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah bersama masyarakat secara kolaboratif mengelola sumber daya yang dimiliki, kemudian membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menciptakan kesempatan kerja baru serta mendorong dinamika pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterogenitas wilayah yang tinggi, dihadapkan pada konsekuensi logis berupa perbedaan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya antar daerah. Wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan komparatif berupa potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis seharusnya mampu menjadi percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang tertinggal. Namun, pemanfaatan potensi ini belum optimal. Oleh karena itu, pembangunan regional yang berimbang dan terintegrasi sangat diperlukan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui penguatan sinergi dan interaksi antarwilayah.

Menurut Tikson (2005) dalam (Anggara & Sumantri, 2016) pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara terencana melalui kebijakan dan strategi. Transformasi ekonomi tampak dari meningkatnya peran sektor industri dan jasa, sementara sektor pertanian menurun. Transformasi sosial ditandai dengan pemerataan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Sementara itu, transformasi budaya mencakup perubahan nilai dan norma, seperti pergeseran dari spiritualisme ke materialisme dan dari lembaga tradisional ke organisasi modern. Intinya, pembangunan mencakup perubahan menyeluruh di berbagai bidang kehidupan untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil pemerintah dan masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil pemerintah dan masyarakat pada tahun sebelumnya (Rahardjo, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 258 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, termasuk indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun rencana pembangunan berdasarkan indikator-indikator ekonomi utama, seperti pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan PDRB menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Pemilihan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi didasarkan pada beberapa alasan berikut:

1. PDRB mempresentasikan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses tersebut..
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Pendekatan konsep ini memungkinkan perbandingan output antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara konsisten.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena mencerminkan pertumbuhan output riil yang dihasilkan oleh perekonomian dalam suatu periode tertentu tanpa dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selain sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB juga berfungsi untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kesejahteraan umumnya menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya pertumbuhan PDRB yang tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan, terutama jika laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB. (Rahardjo, 2014).

Salah satu indikator utama untuk menilai kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum, PDRB merepresentasikan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh pelaku ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada masing-masing tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga tetap dari tahun dasar tertentu, sehingga mencerminkan perubahan volume produksi riil. PDRB harga berlaku umumnya digunakan untuk menganalisis perubahan struktur dan komposisi ekonomi, sementara PDRB harga konstan dimanfaatkan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, baik antar tahun maupun antar triwulan. (Badan Pusat Statistik).

Terdapat tiga pendekatan utama yang lazim digunakan dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini, PDRB dihitung sebagai total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu, umumnya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut

diklasifikasikan ke dalam 17 kategori lapangan usaha, antara lain: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik dan Gas; 5) Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah; 6) Konstruksi; 7) Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan; 8) Transportasi dan Pergudangan; 9) Akomodasi dan Makanan Minuman; 10) Informasi dan Komunikasi; 11) Jasa Keuangan dan Asuransi; 12) Real Estat; 13) Jasa Perusahaan; 14) Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan; 15) Jasa Pendidikan; 16) Jasa Kesehatan dan Sosial; serta 17) Jasa Lainnya. Setiap kategori ini selanjutnya diuraikan lagi dalam sub kategori usaha.

b. Pendekatan Pendapatan

Melalui pendekatan ini, PDRB mencerminkan total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi yang berperan dalam kegiatan produksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan ini mencakup upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan usaha, seluruhnya sebelum dikenai pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selain itu, pendekatan ini juga memperhitungkan penyusutan serta pajak tidak langsung bersih (yakni pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini melihat PDRB sebagai akumulasi dari semua komponen permintaan akhir, yang meliputi: 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; 2) pengeluaran konsumsi lembaga *non-profit* yang melayani rumah tangga; 3) pengeluaran konsumsi pemerintah; 4) pembentukan modal tetap domestik bruto; 5) perubahan persediaan; dan 6) ekspor neto (yaitu nilai ekspor dikurangi impor).

Secara konseptual ketiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama. Sehingga total pengeluaran akan sesuai dengan nilai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan juga harus setara dengan total pendapatan yang dihasilkan untuk faktor-faktor produksi. Produk Domestik Regional Bruto yang diturunkan dengan cara ini ditetapkan sebagai PDRB pada harga pasar, karena di dalamnya sudah mencakup pajak tidak langsung neto.

Sektor pariwisata merupakan satu dari beberapa penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusinya dalam menciptakan peluang usaha, menyerap tenaga kerja, dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Ketika dikelola secara terencana dan berkelanjutan, pariwisata dapat menjadi katalis pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, baik dari segi alam, budaya, maupun kreativitas masyarakat. Keberhasilan pengembangan sektor ini tercermin dari meningkatnya pendapatan daerah, tumbuhnya UMKM dan menguatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Pariwisata merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi tinggi bagi suatu daerah, terutama ketika dikelola menjadi destinasi wisata yang mampu menarik kunjungan baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain memberikan manfaat ekonomi, sektor ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih peduli terhadap negaranya. Pariwisata menjadi

daya tarik bagi banyak individu karena mampu memadamkan kejenuhan, menumbuhkan kreativitas, serta berkontribusi dalam meningkatkan produksi pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata merupakan berbagai aktivitas wisata serta didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat hingga daerah. Kepariwisata mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sektor pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin. Aktivitas ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan individu dan negara, serta mencerminkan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, antar wisatawan, serta dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi berbagai sektor yang ada, termasuk sektor pariwisata. Kepariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di banyak wilayah di Indonesia, sektor pariwisata telah terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, khususnya daerah yang memiliki kekayaan budaya, alam, dan sejarah yang khas.

Untuk mengidentifikasi potensi sektor pariwisata sebagai potensi daerah, melihat pada PDRB menurut lapangan usaha pada sektor akomodasi (hotel, penginapan), makan dan minum (restoran, cafe, rumah makan). Akomodasi, makan dan minum merupakan komponen utama konsumsi wisatawan, sehingga kontribusi ekonomi dari wisatawan umumnya tercermin paling dominan dalam sektor ini. Karena mayoritas pengeluaran wisatawan ditujukan pada penginapan dan konsumsi makanan-minuman, maka sektor inilah yang digunakan untuk merepresentasikan kontribusi langsung dari aktivitas pariwisata dalam struktur PDRB.

a) Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup aktivitas penyediaan tempat tinggal sementara bagi wisatawan atau pengunjung lainnya. Selain akomodasi jangka pendek, juga termasuk penyediaan tempat tinggal dalam jangka waktu lebih lama seperti bagi pelajar atau pekerja, misalnya asrama atau rumah kost, baik yang menyediakan makan maupun tidak. Layanan akomodasi ini bisa berupa penyediaan tempat menginap saja atau dilengkapi dengan makanan, minuman, serta fasilitas rekreasi. Yang termasuk dalam akomodasi jangka pendek antara lain hotel berbintang dan non-bintang, losmen, motel, dan jenis penginapan lainnya. Kegiatan penyediaan makanan, minuman, serta fasilitas tambahan lainnya yang ditujukan bagi tamu juga dimasukkan dalam kategori ini apabila dikelola dalam satu manajemen dengan penginapan, karena data terkait sulit untuk dipisahkan secara terpisah.

b) Penyediaan Makan dan Minum

Subkategori ini mencakup aktivitas penyediaan makanan dan minuman yang disajikan untuk dikonsumsi langsung, mencakup berbagai jenis layanan seperti restoran tradisional, restoran swalayan (self-service), maupun layanan bawa pulang (take away), baik yang beroperasi di lokasi permanen maupun sementara, dengan atau tanpa fasilitas tempat duduk. Yang dimaksud dengan penyediaan makanan dan minuman dalam konteks ini

adalah layanan berdasarkan pesanan, di mana makanan dan minuman disiapkan untuk dikonsumsi segera.

Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang terkenal akan keunikan budaya, tradisi pemakaman, arsitektur rumah adat Tongkonan, serta keindahan alamnya. Potensi ini menjadikan Tana Toraja sebagai daerah dengan daya tarik wisata yang tinggi, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan terjadi pula peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan keterampilan yang lebih baik, pekerja dapat berkontribusi pada sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif, yang akan meningkatkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) dan secara langsung mengangkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang menyertakan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas serta program peningkatan keterampilan akan memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Siagian, 1999).

Penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin & As'ad (2024) "Analisis Basis Sektor Unggulan Ekonomi Kabupaten Maros" menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan Tipologi Klassen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan yang secara konsisten menjadi sektor basis dengan nilai $LQ > 1$, memiliki daya saing tinggi (Differential Shift positif), serta tergolong dalam kuadran I Tipologi Klassen (sektor maju dan tumbuh cepat). Selain itu, sektor industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan juga masuk dalam kategori sektor basis sebelum pandemi. Menariknya, selama pandemi, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang meningkat statusnya menjadi sektor basis dikarenakan adanya peningkatan fokus pemerintah daerah terhadap layanan sanitasi dan pengelolaan limbah.

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi sektor unggulan dapat terjadi akibat intervensi kebijakan dan perubahan kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti pandemi. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam menganalisis dinamika sektor basis dan memberikan pendekatan metodologis yang relevan untuk studi-studi serupa di daerah lain.

Selanjutnya, penelitian oleh Tyas dkk (2022) "Analisis Perubahan Perkembangan Pariwisata pada Struktur Ekonomi Kota Yogyakarta Saat New Normal" menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata memakai pendekatan *Shift Share* dan Tipologi Klassen. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor pariwisata (sub-sektor penyediaan akomodasi dan makan minum) mengalami perlambatan kontribusi terhadap PDRB dan digolongkan sebagai sektor potensial, bukan lagi sebagai sektor unggulan. Meski demikian, sektor ini masih menyimpan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan investasi serta pemanfaatan teknologi yang lebih kuat. Hasil penelitian ini juga

mengindikasikan bahwa sektor pendidikan dan informasi tetap menjadi sektor andalan di kota Yogyakarta selama masa pemulihan ekonomi.

Berdasarkan penelitian Patandean, Masinambow, & Masloman (2021) "Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Tana Toraja" Perekonomian Kabupaten Tana Toraja mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke sektor tersier dalam kurun waktu 2011–2020. Hal ini ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi dan meningkatnya kontribusi sektor tersier seperti perdagangan, jasa, serta akomodasi dan makan minum. Meskipun sektor pariwisata termasuk dalam kelompok sektor tersier dan memiliki potensi besar (terutama karena kekayaan budaya dan alam), kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum terlihat dominan jika dibandingkan sektor lain. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang belum merata serta penurunan produktivitas pertanian akibat faktor alam dan demografi menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis dan unggulan yang benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melihat potensi sektor pariwisata sebagai penggerak baru perekonomian di Kabupaten Tana Toraja.

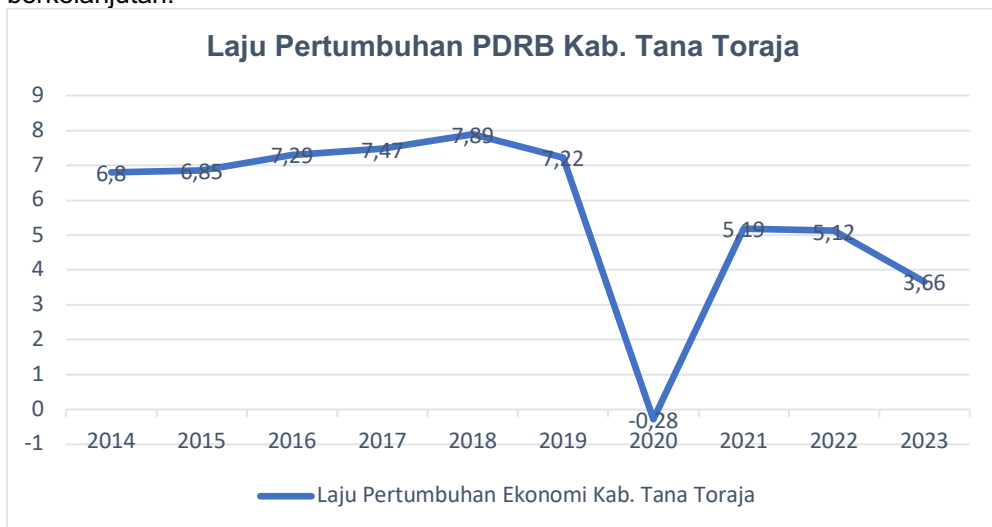
Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis posisi sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang memiliki keragaman daya tarik, baik secara fisik maupun budaya. Dari segi fisik, Tana Toraja memiliki bentang alam yang menakjubkan, seperti perbukitan hijau, sawah berundak, dan desa-desa adat yang masih terjaga keasliannya. Udaranya yang sejuk serta keindahan panorama alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari sisi budaya, Tana Toraja memiliki kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang unik dan autentik, seperti upacara adat Rambu Solo', Rambu Tuka', rumah adat Tongkonan, serta berbagai seni dan kerajinan tangan khas daerah. Kuliner tradisional dan bahasa lokal yang masih digunakan oleh masyarakat juga menambah daya tarik budaya yang kuat.

Potensi ini seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain, pemerintah daerah telah mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan, namun belum ada analisis yang mendalam mengenai sejauh mana sektor ini benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan apakah sektor pariwisata memiliki daya saing dan keunggulan sebagai sektor unggulan ke depan, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah sektor pariwisata menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Tana Toraja.

Melihat tingginya daya tarik wisata yang dimiliki Tana Toraja, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sektor pariwisata benar-benar menjadi kekuatan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis pertumbuhan sektor

pariwisata dengan memahami kontribusi relatif dan pertumbuhan sektoral dalam konteks pembangunan wilayah.

Dalam konteks administrasi pembangunan, analisis kontribusi sektor ekonomi seperti pariwisata menjadi penting untuk merancang kebijakan yang berbasis pada keunggulan lokal. Administrasi pembangunan sendiri dipahami sebagai proses pengelolaan perubahan sosial, ekonomi dan kelembagaan secara terencana melalui kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah (Siagian, 2005). Pendekatan ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengidentifikasi potensi sektor strategis dan memfasilitasi pertumbuhan melalui perencanaan yang efektif dan partisipatif. Oleh karena itu, identifikasi terhadap sektor unggulan melalui pendekatan seperti *Shift Share Analysis* dan *Location Quotient* menjadi instrumen penting dalam kerangka administrasi pembangunan, karena memberikan dasar empiris dalam pengambilan keputusan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.



Grafik 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014-2023 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja

Grafik diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Puncak pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka mencapai 7,89 persen, sedangkan penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,28 persen. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi wisata budaya dan alam yang kuat, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pandemi menunjukkan betapa rentannya sektor ini terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengembangan

ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengkajian terhadap struktur ekonomi daerah, termasuk kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan PDRB. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis pola struktur perekonomian dan sektor unggulan, khususnya kontribusi sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tana Toraja.

I. 2 Tinjauan Teori

I. 2.1 Administrasi Pembangunan

Saul M. Katz mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya (Indrawijaya & Pranoto, 2011).

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik di berbagai bidang.

Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dari satu keadaan nasional menuju keadaan lain yang dianggap lebih baik, ditandai dengan kemajuan yang stabil dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. (Tjokrowinoto, 1996)

Sebagai sekedar gambaran untuk lebih menjelaskan, berikut dijelaskan beberapa pengertian tentang administrasi pembangunan oleh berbagai ahli .

Paul Meadows dalam buku *Motivation For Change and Development Administration*, 1968:86 mendefinisikan bahwa "*Development administration can be regarded as the public management of economic and social change in term of deliberate public policy. The development administrator is concerned with guiding change*". Kurang lebih artinya ialah Administrasi Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dan perubahan sosial , melalui perumusan serta pelaksanaan kebijakan public. Administrator pembangunan dalam hal ini berperan sebagai utama dalam merancang dan mengarahkan proses pembangunan menuju tujuan yang diinginkan.

Hiram S. Phillips menjelaskan "*The term of Development Administration is used rather than the traditional term of Public Administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economics changes*". Kurang lebih maksudnya adalah istilah administrasi pembangunan digunakan sebagai pembeda dari administrasi pemerintahan yang tradisional untuk menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan. modern.

Montgomery dan Esman dalam "*Development Administration in Malaysia*" mengemukakan administrasi pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (*The development of administration*) dan

juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (*administration of the development*).

Edward W. Weidner berpendapat bahwa "*Development Administration: public administration with a special purpose. Administration with the objective of political, economic and social development. Development administration is the process of guiding an organization toward the achievement of development objectives. It is action oriented, and it places administration at the centre in facilitating the attainment of development objectives.*"

Menurut Siagian, administrasi pembangunan dipahami sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari serangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang dirancang secara terencana yang bertujuan untuk mendorong modernisasi di berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks pembangunan nasional (*nation-building*). Adapun definisi operasional (*working definition*) yang dikemukakan oleh Siagian menyatakan bahwa administrasi pembangunan mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tatanan kehidupannya sebagai sebuah bangsa, mencakup berbagai dimensi kehidupan, demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada pokoknya pendekatan administrasi pembangunan diartikan administrasi pembangunan dipahami sebagai proses pengelolaan atau pengendalian berbagai upaya oleh negara atau pemerintah guna mewujudkan pertumbuhan yang telah direncanakan menuju kondisi yang lebih baik dan progresif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam rumusan sebelumnya, administrasi dimaknai sebagai mekanisme pengelolaan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial menuju masa depan yang lebih baik. Umumnya, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendukung proses pembinaan bangsa (*nation building*) serta mendorong perkembangan sosial dan ekonomi.

I. 2.2 Pembangunan Ekonomi

Clark (1991) dalam (Indrawijaya & Pranoto, 2011) mengemukakan bahwa pada akhir dasawarsa 1950-an istilah pembangunan sering dianggap sebagai suatu obat terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya Teori Pertumbuhan. Pemikiran mengenai teori pertumbuhan ini berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan. Pada umumnya mereka menggunakan GNP (*Gross National Product*) atau PDB (*Pendapatan Domestik Bruto*) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Dalam dasawarsa 1950 hingga 1960, ahli-ahli ekonomi cenderung mendominasi perdebatan tentang pembangunan ini, dan pada hakikatnya merekalah yang menentukan lingkup intelektual perdebatan- perdebatan itu. Dapat dipahami bahwa para perencana dalam kurun ini juga sangat dipengaruhi oleh para ahli ekonomi di bidang pembangunan. Untuk beberapa perencana tertentu, pembangunan sama dengan pertumbuhan, dan pada gilirannya sinonim dengan industrialisasi serta

produktivitas. Kebanyakan ahli ekonomi dalam dasawarsa 1950 an menganggap industrialisasi sebagai hal hakiki bagi pertumbuhan, dan karena itu memusatkan diri pada apa yang perlu dilakukan supaya proses industrialisasi dapat berjalan.

Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya yang tersedia (Kartasasmita, 1997).

Teori pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidaknya-tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*). *Division of labor* akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Kartasasmita, 1997).

Teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan rendah.

Pertumbuhan ekonomi adalah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi adalah untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. (Rahardjo, 2014).

I. 2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Tarigan (2004) Pendapatan regional merujuk pada tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Tingkat pendapatan ini dapat diukur berdasarkan total pendapatan wilayah secara keseluruhan maupun rata-rata pendapatan per individu. Dalam penghitungan pendapatan regional, digunakan konsep domestik, yakni mencakup seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang beroperasi di wilayah tersebut, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, tanpa mempertimbangkan kepemilikan atas faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan nilai produk yang dihasilkan (*originated*) dari wilayah tersebut (Arniati, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional merepresentasikan kapasitas wilayah dalam menghasilkan output berupa nilai tambah dalam periode waktu tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan. Pendekatan produksi menyajikan komposisi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha berdasarkan aktivitas produksinya, sedangkan pendekatan penggunaan memaparkan distribusi nilai tambah tersebut menurut komponen

penggunaannya. Dengan demikian, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan agregasi nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut, sementara dari sisi penggunaan menunjukkan pola pemanfaatan nilai tambah tersebut dalam perekonomian regional.

PDRB berdasarkan lapangan usaha disusun menurut total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi, yang meliputi kategori-kategori seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya (Badan Pusat Statistik, 2024).

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua jenis penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Penilaian dengan harga berlaku menggunakan harga pada tahun berjalan untuk mengukur seluruh agregat, sementara penilaian dengan harga konstan didasarkan pada harga dari tahun dasar tertentu guna menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu, sehingga menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara riil (BPS, 2020). Dengan menggunakan harga konstan, kita dapat membandingkan kinerja ekonomi dari tahun ke tahun secara lebih akurat, karena pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif atau riil dari berbagai sektor ekonomi. Nilai ini sangat penting dalam analisis ekonomi makro, terutama untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun yang sedang berlaku. Nilai ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB (BPS, 2020). PDRB berdasarkan harga berlaku digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi serta kontribusi relatif setiap sektor terhadap total PDRB pada tahun tertentu. Nilai ini penting untuk menunjukkan besaran ekonomi aktual suatu wilayah, seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektoral, dan perbandingan antar wilayah secara nominal.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan. Perhitungan laju pertumbuhan dilakukan dengan mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya (tahun ke n-1), kemudian membagi selisih tersebut dengan nilai PDRB pada tahun ke n-1, dan mengalikannya dengan 100 persen. Laju pertumbuhan ini menggambarkan perubahan agregat pendapatan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

Dalam PDRB, tidak terdapat kategori khusus sektor pariwisata, sehingga kontribusinya umumnya direpresentasikan melalui lapangan usaha akomodasi, makan dan minum yang mencakup layanan penginapan, restoran, dan usaha kuliner penunjang wisata. Kategori ini berfungsi sebagai proksi sektor pariwisata karena secara substansial aktivitasnya bergantung pada pergerakan wisatawan dan menjadi indikator tidak langsung dari besaran aktivitas pariwisata di suatu daerah. Secara metodologis, penggunaan proksi ini sejalan dengan praktik BPS dan standar statistik internasional, di mana aktivitas ekonomi yang dipicu oleh kunjungan wisata dianggap mewakili kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Perlu dipahami bahwa penggunaan lapangan usaha akomodasi, makan dan minum sebagai proksi sektor pariwisata hanya merepresentasikan sebagian dari keseluruhan kontribusi pariwisata, karena aktivitas wisata juga mendorong sektor lain seperti transportasi, perdagangan, seni budaya, serta industri kreatif. Artinya, data PDRB melalui proksi pendapatan akomodasi makan dan minum memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi bahwa semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, semakin besar pula dapat diasumsikan peningkatan aktivitas pariwisata di suatu wilayah.

I. 2.4 Location Quotient dan Shift Share Analysis

a) Location Quotient

Location quotient merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dalam ilmu ekonomi regional yang digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti provinsi atau nasional. Konsep ini diperkenalkan dan dikembangkan secara sistematis oleh Walter Isard dalam bukunya *Methods of Regional Analysis* (1960). Menurut Isard, LQ digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor di daerah merupakan sektor *basis* yakni sektor yang memproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh penduduk lokal dan dengan demikian potensi mengekspor ke luar daerah atau sektor *non basis*, yaitu sektor yang hanya melayani kebutuhan internal wilayah. Nilai Lq dihitung melalui perbandingan antara Proporsi sektor tertentu terhadap total sektor di daerah dengan proporsi yang sama di wilayah acuan. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai sektor basis. Jika nilai $LQ=1$ berarti sektor tersebut tumbuh secara proporsional, sedangkan nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut kurang berkembang dibandingkan wilayah referensi. Analisis ini penting dalam perencanaan pembangunan karena membantu mengidentifikasi sektor unggulan daerah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Sektor dengan nilai lebih tinggi mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki spesialisasi ekonomi di sektor tersebut, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi dapat difokuskan pada peningkatan produktivitas, daya saing, serta perluasan pasar dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, sektor dengan nilai LQ rendah tidak serta-merta dianggap tidak penting, karena tarsok sektor tersebut dapat saja berfungsi vital dalam mendukung kebutuhan lokal dan kestabilan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu LQ menjadi alat yang efektif dalam perencanaan ekonomi sektoral,

terutama ketika digunakan bersama dengan analisis pertumbuhan sektor lainnya seperti *shift share analysis* untuk mendapatkan gambaran yang lebih mengenai posisi dan potensi ekonomi suatu wilayah.

b) Shift Share Analysis

Metode share merupakan salah satu teknik analisis dalam ekonomi regional yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar wilayah maupun dari dalam wilayah itu sendiri. Faktor eksternal mencakup perkembangan aktivitas ekonomi nasional maupun internasional yang berdampak melalui keterkaitan ekonomi yang erat dengan perekonomian daerah tersebut. Sementara itu, faktor internal biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi regional serta potensi khusus yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan (Sjafrizal, 2014).

Pada tahun 1943 teori analisis *shift share* dikembangkan oleh Daniel B. Creamer. Analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi (misalnya pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan) suatu variabel regional sektor atau industri dalam suatu daerah. Variabel atau data yang digunakan dalam menganalisis adalah tenaga kerja atau kesempatan kerja nilai tambah, pendapatan, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan variabel lain (waktu tertentu

Edgar S. Dunn (1960) mengemukakan bahwa *Shift Share Analysis* merupakan teknik statistik dan analitis untuk memahami perkembangan ekonomi regional dalam kerangka ekonomi nasional.

“The purpose of this paper is to present a statistical and analytical technique for understanding the regional development of a national economy. This technique permits the identification of the results of factors (a) operating more or less uniformly nationally, and (b) operating more or less specifically in a particular region” (Dunn, 1960).

Teknik ini bertujuan mengidentifikasi perubahan ekonomi di suatu wilayah yang berasal dari dua sumber utama yaitu kekuatan nasional yang berdampak luas (*national effect*) dan kekuatan spesifik lokal (*regional or differential effect*). Dalam aplikasinya, SSA memisahkan pertumbuhan ekonomi menjadi tiga komponen yaitu pertumbuhan nasional (*national share*), pergeseran struktural (*proportional share*) dan pergeseran diferensial (*differential share*).

Pertumbuhan nasional (*national Share*) ini menggambarkan pertumbuhan yang akan terjadi pada sektor tertentu di suatu daerah jika sektor tersebut tumbuh sejalan dengan tingkat pertumbuhan nasional secara keseluruhan. Pergeseran struktural (*proportional share*) menunjukkan apakah sektor yang dianalisis termasuk dalam sektor dengan pertumbuhan tinggi secara nasional atau tidak. Kemudian pergeseran diferensial (*differential share*) mencerminkan daya saing atau keunggulan lokal suatu sektor di daerah, jika sektor tumbuh lebih cepat di daerah daripada di tingkat nasional, berarti ada keunggulan lokal.

Menurut Dunn pendekatan ini penting karena pertumbuhan suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh tren ekonomi nasional. Tetapi juga oleh karakteristik dan keunggulan kompetitif lokal yang unik pada setiap sektor ekonomi. Misalnya, wilayah

yang memiliki proporsi besar pada setiap sektor dengan pertumbuhan tinggi secara nasional akan menunjukkan kinerja yang lebih baik secara struktural., Namun jika sektor tersebut juga berkembang lebih cepat secara lokal dibandingkan wilayah lain, maka hal itu menunjukkan adanya keunggulan kompetitif lokal.

SSA menjadi alat penting dalam analisis kebijakan karena mampu menggambarkan secara empiris kontribusi relatif antara struktur sektoral dan daya saing daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

“The statistical tool is not just a useful tool for describing regional economic phenomena. It also provides a useful framework for analysis” (Dunn, 1960).

Selain itu Dunn juga menekankan fleksibilitas teknik ini karena dapat digunakan untuk berbagai dimensi ekonomi seperti tenaga kerja, pendapatan, atau output dan dapat diterapkan dalam berbagai tingkat agregasi data. Ia juga menyarankan bahwa teknik ini dapat menjadi kerangka yang bermanfaat untuk membuat proyeksi regional di masa depan, asalkan didukung oleh data historis dan pemahaman kontekstual terhadap efek struktural dan diferensial.

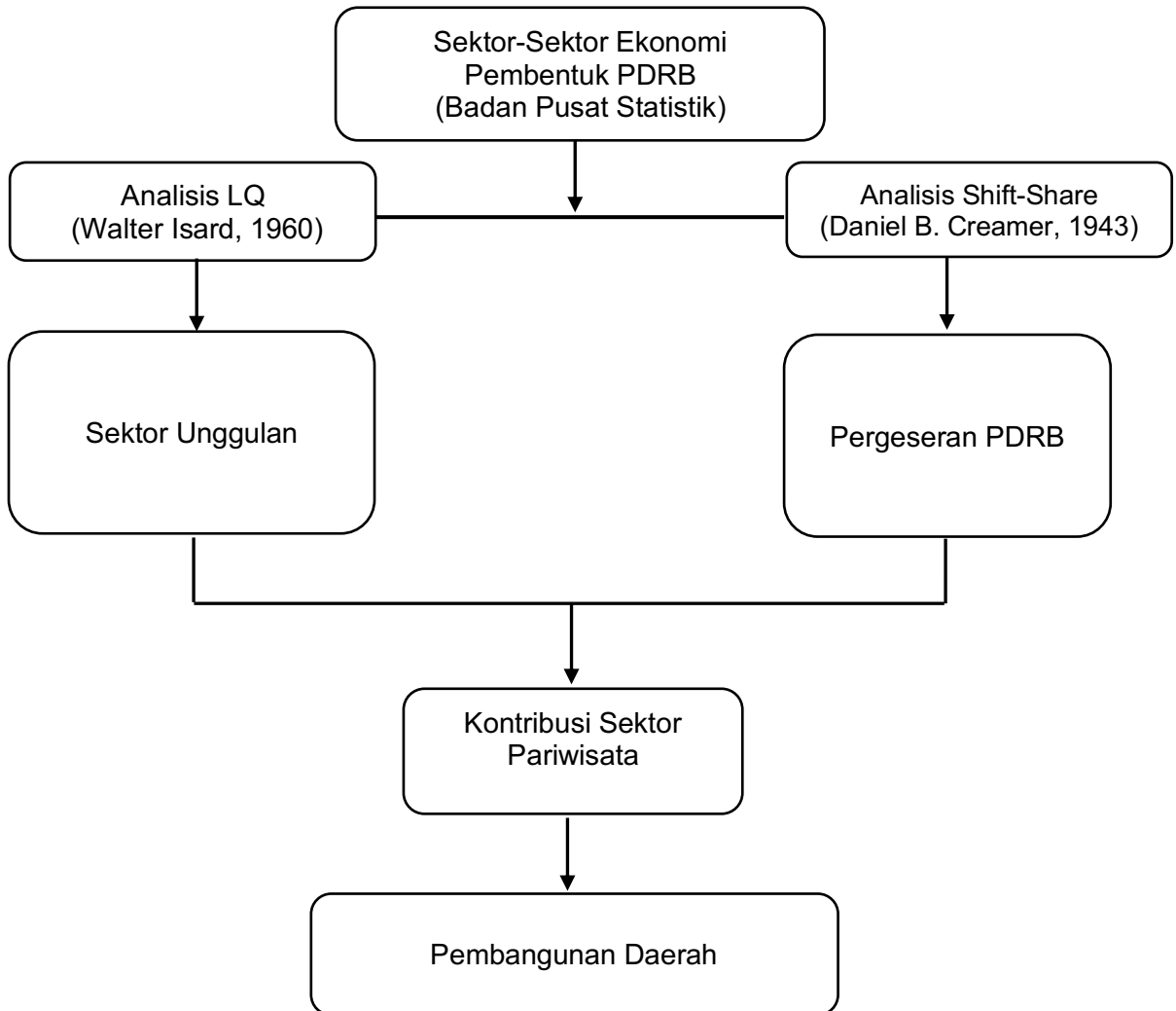
I. 2.5 Kerangka Pikir

Dalam menganalisis dinamika pertumbuhan sektor ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata di kabupaten Tana Toraja, penelitian ini mengacu pada pendekatan *Shift Share Analysis* (SSA) yang dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943). Pendekatan ini menjadi salah satu metode fundamental dalam studi ekonomi regional karena mampu menguraikan pertumbuhan suatu sektor ke dalam tiga komponen utama yaitu, pertumbuhan nasional (*national share*), pergeseran proporsional (*proportional shift*), dan keunggulan kompetitif lokal (*differential shift*). Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi apakah pertumbuhan sektor pariwisata disebabkan oleh faktor eksternal yang mengikuti pola ekonomi makro provinsi, atau oleh kekuatan internal berupa keunggulan dan daya saing wilayah. Dengan demikian, SSA memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami kontribusi sektoral secara lebih spesifik dan menjadi acuan dalam Menyusun strategi pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan lokal (Dunn, 1960).

Selain *Shift Share Analysis*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ) yang secara konseptual dikembangkan dan dipopulerkan oleh Walter Isard dalam kajian ilmu ekonomi regional. LQ merupakan alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi atau konsentrasi suatu sektor ekonomi di daerah tertentu dibandingkan dengan wilayah acuan yang lebih luas, seperti provinsi atau nasional (Isard, 1960). Dalam konteks ini, analisis LQ menjadi penting untuk mengetahui apakah sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tana Toraja, merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif. Dengan mengetahui sektor basis, pemerintah daerah dapat lebih terarah dalam menetapkan prioritas pembangunan serta strategi pengembangan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Oleh karena itu, penggunaan LQ memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat analisis, dilakukan pula perbandingan PDRB sektor pariwisata dengan dua daerah yang telah dikenal sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional, yaitu Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) dan Kabupaten Badung

(Bali). Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi strategis sektor pariwisata Tana Toraja secara lebih objektif dalam konteks regional dan nasional.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

I. 3 Tujuan dan Manfaat

a) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tana Toraja pada periode 2014–2023.

2. Untuk mengidentifikasi tingkat keunggulan kompetitif sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dibandingkan dengan sektor lain melalui pendekatan *Location Quotient* (LQ).
3. Untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan komponen pertumbuhan nasional, proporsional, dan diferensial melalui *Shift-Share Analysis* (SSA).
4. Untuk menganalisis dinamika perkembangan sektor pariwisata di 3 daerah pariwisata di Indonesia dari tahun 2014 – 2023.

b) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dengan menambah kajian mengenai peran sektor pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB di Kabupaten Tana Toraja
- Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, dalam merumuskan kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

BAB II METODE PENELITIAN

II. 1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.

II. 2 Prosedur Penelitian

- **Pengumpulan Data**

- 1) Data Sekunder

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *time series*. Data yang dikumpulkan berupa data PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Tana Toraja periode 2014 – 2023, PDRB ADHK 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 – 2023, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Badung tahun 2014 – 2023, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sleman tahun 2014 – 2023. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- **Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini merinci karakteristik data, mengevaluasi nilai variabel-variabel tanpa membandingkan dengan variabel lain, dan memberikan gambaran yang sistematis serta akurat mengenai aspek tertentu atau keadaan yang diobservasi secara obyektif (Sujarweni, 2015). Dalam riset ini, penulis menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA) untuk menampilkan perubahan dan pergeseran sektor ekonomi secara nasional.

- a. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi atau konsentrasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah acuan yang lebih besar biasanya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor apa saja yang masuk dalam sektor unggulan dengan unggulan di suatu wilayah. Berikut adalah cara menghitung analisis LQ:

$$LQ = \frac{pi}{pt} : \frac{Pi}{Pt}$$

Keterangan:

pi = Nilai PDRB suatu sektor Kabupaten

pt = Nilai PDRB seluruh sektor Kabupaten

Pi = Nilai PDRB suatu sektor tingkat Provinsi

Pt = Nilai PDRB seluruh sektor tingkat Provinsi

Setelah mengetahui hasil dari perhitungan LQ maka analisis selanjutnya yaitu menentukan kriteria suatu sektor apakah sektor tersebut termasuk sektor unggulan ataukah non unggulan.

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai LQ lebih dari 1, maka sektor i dianggap sebagai sektor unggulan di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki kelebihan produksi yang dapat diekspor ke wilayah lain, sehingga dikategorikan sebagai sektor basis.
- 2) Jika nilai LQ kurang dari 1, berarti sektor i bukan merupakan sektor unggulan. Dengan kata lain, sektor ini tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan cenderung bergantung pada pasokan dari luar, sehingga termasuk dalam sektor non-basis.
- 3) Jika nilai LQ sama dengan 1, maka kontribusi sektor i di daerah tersebut sebanding dengan kontribusinya di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Asumsi utama dari perhitungan ini adalah bahwa penduduk di setiap kota atau daerah memiliki pola permintaan barang dan jasa yang serupa dengan pola permintaan di tingkat provinsi.

Perhitungan LQ menghasilkan dua kriteria yaitu jika LQ lebih dari 1, maka sektor tersebut diklasifikasikan sebagai “basis” karena memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan jika LQ kurang dari satu atau sama dengan 1, maka sektor tersebut “non basis” karena tidak memiliki keunggulan (Arniati, 2022).

b. Analisis *Shift Share*

Metode *Shift Share Analysis* digunakan untuk memeriksa dinamika pertumbuhan sektor ekonomi suatu wilayah serta kinerja ekonomi wilayah tersebut. Metode ini berguna sebagai perbandingan antara wilayah spesifik, seperti kabupaten atau kota, dengan entitas geografis yang lebih besar seperti provinsi atau nasional. Penggunaan *Shift Share Analysis* bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam struktur perekonomian Kabupaten Tana Toraja. Melalui analisis *shift-share*, diperoleh data terkait kinerja ekonomi yang terbagi menjadi tiga komponen bidang sebagai berikut:

1) *National Share* (Nij)

National Share melibatkan penilaian melalui analisis peningkatan PDRB suatu kota atau Kabupaten dalam periode spesifik dibandingkan dengan peningkatan PDRB keseluruhan Provinsi.

2) *Proportional Shift (Mixed Shift)* (Mij)

Proportional Shift mengukur perubahan netto tingkat sektor-sektor pada PDRB kota atau Kabupaten. Ketika terjadi peningkatan, wilayah tersebut fokus pada sektor-sektor yang tumbuh lebih pesat daripada perekonomian wilayah provinsi. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, wilayah tersebut cenderung mengutamakan sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat.

3) *Differential Shift (Competitive Shift)* (Cij)

Differential Shift merupakan alat pengukuran yang mengidentifikasi tingkat daya saing sektor-sektor ekonomi lokal, membandingkannya dengan ekonomi provinsi atau nasional. Ketika nilai positif muncul pada suatu sektor, menandakan keunggulan kompetitif sektor tersebut, sedangkan nilai

negative mengindikasikan kurangnya keunggulan kompetitif pada sektor tersebut.

4) Perubahan PDRB (Dij)

Perubahan PDRB sektor di daerah j, merupakan bagian penting yang menunjukkan seberapa besar perubahan output suatu sektor ekonomi di daerah tertentu dalam suatu periode waktu.

Berikut rumus menurut Daniel B. Creamer persamaan dan komponen-komponennya dalam analisis *Shift Share* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} D_{ij} &= N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \\ N_{ij} &= E_{ij} X r_n \\ M_{ij} &= E_{ij} X (r_{in} - r_n) \\ C_{ij} &= E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \end{aligned}$$

Keterangan :

- E_{ij} : Nilai rata-rata perekonomian sektor i Kabupaten Tana Toraja
 i : Sektor-sektor ekonomi yang diteliti
 j : Menunjukkan wilayah pembandingan, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan
 r_n : Nilai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan.
 r_{in} : Nilai rata-rata laju pertumbuhan sektor i Provinsi Sulawesi Selatan
 r_{ij} : Nilai rata-rata laju pertumbuhan sektor i Kabupaten Tana Toraja.
 D_{ij} : Menunjukkan total perubahan PDRB pada sektor i di Kabupaten Tana Toraja selama periode analisis
 N_{ij} : Menggambarkan perubahan PDRB sektor i Kabupaten Tana Toraja yang terjadi akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi umum di Provinsi Sulawesi Selatan.
 M_{ij} : Menunjukkan perubahan PDRB sektor i Kabupaten Tana Toraja yang disebabkan oleh tingkat pertumbuhan sektor i di Provinsi Sulawesi Selatan
 C_{ij} : Menunjukkan nilai perubahan PDRB sektor i yang berasal dari keunggulan sektor tersebut di Kabupaten Tana Toraja dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi

Analisis *Shift Share* memiliki berbagai manfaat, antara lain untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor ekonomi di suatu daerah dibandingkan dengan perkembangan sektor yang sama di wilayah yang lebih luas. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk membandingkan kinerja relatif antar sektor ekonomi dalam suatu wilayah, menilai kemajuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya, serta mengukur besarnya aktivitas sektor tertentu dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Di samping itu, analisis ini memungkinkan perbandingan laju pertumbuhan sektor ekonomi suatu daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan sektornya masing-masing.

II. 3 Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas

Dalam penelitian ini, 3 bentuk validitas yang harus dicari adalah:

a) *Content validity*

Validitas isi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item yang dianalisis benar benar mempresentasikan konten atau materi yang dimaksud dalam instrument.

b) *Predictive Validity*

Validitas ini bertujuan untuk menilai sejauh mana skor yang diperoleh dapat memprediksi kriteria yang ingin diukur, serta apakah skor tersebut memiliki korelasi dengan hasil pengukuran lainnya.

c) Validitas konstruk

Validitas konstruk digunakan untuk menilai apakah item yang diuji sudah mencerminkan konstruk atau konsep teoritis yang menjadi dasar hipotesis penelitian.

2. Reliabilitas data

Dalam penelitian ini, reliabilitas data diperoleh dengan menelusuri laporan terkait konsistensi internal, yaitu untuk memastikan bahwa respons setiap item sejalan dengan kenstruksi yang telah dirancang, serta melalui uji korelasi test-retest guna mengetahui apakah skor yang dihasilkan tetap stabil meskipun instrument digunakan pada waktu yang berbeda. (Creswell, 2014)